# Analisis Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Angkutan Barang Dengan Sistem Bukti Lulus Uji Elektronik

Tri Ratnasari<sup>1</sup>, Euis Salbiah<sup>2</sup>, Denny Hernawan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Djuanda, <u>triratnasari555@gmail.com</u>

#### **ABSTRAK**

Dinas Perhubungan (DISHUB) merupakan instansi penyelenggara pelayanan jasa yang bergerak pada bidang transportasi dan perhubungan. Dishub membawahi beberapa unit pelaksana teknis. Salah satu unit pelaksana teknis adalah yang memilik tugas di bidang uji kendaraan, yaitu UPTD PKB. Penggunaan *smart card* merupakan bentuk produk layanan pengganti buku uji KIR dalam pelayanan uji Kir dengan sistem Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-E). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Angkutan Barang Dengan Sistem BLU-E Pada Kantor Dishub Kota Depok.

Kata Kunci: kualitas pelayanan, BLU-E, DISHUB UPTD PKB

### **PENDAHULUAN**

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai suatu pemberian pelayanan (services) pada kebutuhan orang-orang atau masyarakat yang memiliki kepentingan atau urusan terhadap organisasi tersebut serta sesuai dengan peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan (Ristiani, 2020:166). Pelayanan publik terdiri atas pelayanan yang memiliki output berupa jasa dan barang. Salah satu penyelenggara pelayanan publik yang berfokus pada bagian jasa yaitu Dinas Perhubungan. Dinas perhubungan adalah penyelenggara negara yang berkewajiban memberikan layanan maksimal di bidang perhubungan dan transportasi. Salah satu peranan pemerintah daerah khusunya Dinas Perhubungan di bidang angkutan dan transportasi adalah memaksimalkan perannya sebagai pembuat kebijkan (Regulator), penyedia fasilitas (Fasilitator), dan sebagai pengawas (Evaluator). Sebagaimana sasaran yang hendak atau ingin dicapai oleh DISHUB adalah terciptanya sebuah pelayanan transportasi secara terpadu, efektif, mencukupi dari segi kapasitas, terjangkau, tertib, teratur lancar serta cepat, aman, mudah, tepat waktu dan nyaman serta efesien dalam sebuah kesatuan jaringan transportasi nasional. Salah satu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan adalah pengujian kendaraan bermotor atau uji kir. Pengujian uji KIR atau uji berkala dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementrian Perhubungan. Kepastian hukum yang menjamin uji KIR diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian di perjelas pembahasannya dalam Peraturan Mentri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 133 tahun 2015 mengenai Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Kebaruan dari kebijakan KIR adalah melalui sistem KIR Elektronik. KIR elektronik merupakan sebuah inovasi dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga tercapainya pelayanan yang efektif dan efisien. Sistem ini mengganti buku KIR menjadi smart card dan sertifikat uji. Kebijakan penggantian buku kir dengan smart card dan sertifikat uji merupakan program nasional yang telah mulai diterapkan pada Tahun 2020. Beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah adalah memudahkan sistem pembayaran KIR serta mencegah paperless yaitu kehilangan kertas copy dalam pembuatan KIR. KIR elektronik ini di dukung oleh smart card sebagai pengganti buku uji KIR. Pemerintah Kota Depok telah menetapkan kebijakan BLU-E KIR tersebut pada DISHUB tepatnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pengujian kendaraan bermotor pada 23 Februari 2023.

KIR elektronik atau Bukti Lulus Uji Elektronnik BLU-E dapat memberikan manfaat antara lain :

- 1. Mengurangi adanya pemalsuan dokumen
- 2. Otomatisasi dalam pendeteksi data melalui menggunakan aplikasi BLU-E
- 3. Meminimalisir anggaran biaya stiker samping dengan menggunakan *smart* card dan *QR Code*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi kulaitas pelayanan pengujian kendaraan angkutan barang dengan sistem BLU-E pada Kantor Dishub Kota Depok

#### **METODE PENELITIAN**

Menurut Sugiyono (2011: 80) "Populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri beberapa obyek/ subyek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang sudah ditetapkan/ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari serta kemudian ditarik dapat kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini,berfokus pada masyarakat pengguna layanan BLU-E KIR Kota Depok yang menjadi populasi dalam sasaran penelitian adalah masyarakat pengguna layanan BLU-E KIR Kota Depok. Jumlah pengguna layanan BLU-E KIR pada Maret 2024 sebanyak 1.704 pengunjung, kemudian sebanyak 30 pegawai pelayanan. Dalam penelitian ini, 1.734 pengunjung menjadi populasi nya.

Menurut Sugiyono (2011:81) "Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang terdapat di dalam populasi tersebut." Teknik sampel yang dipakai adalah *accidental sampling*, yaitu peneliti mengambil sampel dari pengguna layanan (*User*) yang langsung ditemui di lokasi penelitian. Rumus slovin digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini

$$\mathbf{n} = \frac{N}{1 + N\left(e^2\right)}$$

Maka:

$$n = \frac{1734}{1+1734(0,1^2)}$$

$$n = \frac{1734}{1+1734(0,01)}$$

$$n = \frac{1734}{18,34}$$

$$n = 94,54$$

dengan ukuran populasi = 1734 dan e = 10% sehingga diperoleh ukuran sampel (n) sebesar 94,54 dibulatkan menjadi 95 sampel pengguna layanan uji KIR BLU-E.

Pada penelitian ini peneliti memakai metode atau teknik pengumpulan data dengan observasi lokasi penelitian, menyebarkan angket atau kuesioner kepada responden, serta studi kepustakaan.

Teknik analisis deskriptif merupakan teknik analisis data yang digunakan , dengan teknik/metode analisis data memakai rumus WMS (*Weight Mean Score*) dan skala likert yang memiliki penilaian gradasi 1-5 dengan kriteria sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju.

Analisi data merupakan bagian dari proses penelitian yaitu pengolahan data yang bertujuan untuk menggambarkan serta mendeskripsikan keadaan secara objektif dari suatu objek. Adapun indikator-indikator pada penelitian ini mengacu pada teori mengenai Kualitas Pelayanan oleh Afandi (2018, hlm. 43) yang memuat dimensi prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya layanan, produk layanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas pemberi layanan.

Guna mendapatkan angka penafsiran/interpretasi terhadap semua jawaban dari responden, selanjutnya data diolah/dianalisis berdasarkan pada hasil dari jawaban responden yang terdapat pada angket dengan memakai rumus "WMS (weight Mean Skor)". Sebagai berikut:

$$\mathbf{M} = \sum \mathbf{f}(\mathbf{x})/\mathbf{n}$$

M = Perolehan angka penafsiran atau kriteria penafsiran

∑ = Penjumlahan

f = Frekuensi jawaban responden

x = Pembobotan

n = Jumlah sampel penelitian.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

# A. Dimensi Prosedur Pelayanan

Tanggapan responden terhadap dimensi prosedur pelayanan dapat dikelompokan dnegan berdasarkan indikator prosedur yang konsisten,prosedur yang mudah, prosedur yang tidak berbelit-belit. Adapun hasil tanggapan dari indikator prosedur pealayanan terdapat pada tabel 1 :

Tabel 1
Rekapitulasi indikator dari dimensi prosedur pelayanan

Pernyataan Indikator	Nilai Rentang	Kategori
Prosedur pelayanan BLU-E KIR	3,74	Baik
Smart Card yang dijalankan telah		
dilaksanakan secara konsisten dan		
berkelanjutan		
Prosedur pelayanan BLU-E	3,75	Baik
KIR Smart Card yang diberikan		
memudahkan pengguna jasa		
layanan.		
Prosedur pelayanan pada UPT	3,43	Baik
Pengujian Kendaraan Bermotor		
Dishub Depok memuat alur		
yang terperinci baik berupa rincian		
tulisan maupun gambar.		
Rata-Rata	3,64	Baik

Sumber: Penelitian Tri Ratnasari 2024

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator prosedur pelayanan BLU-E KIR *Smart Card* yang dijalankan telah dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan memperoleh nilai 3,74 masuk dalam kategori Baik, indikator Prosedur pelayanan BLU-E KIR *Smart Card* yang diberikan memudahkan pengguna

jasa layanan memperoleh nilai 3,75 masuk dalam kategori Baik, indikator Prosedur pelayanan pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Depok memuat alur yang terperinci baik berupa rincian tulisan maupun gambar mendapatkan rataan nilai 3,43 dengankategori Baik. Maka dimensi prosedur pelayanan memperoleh nilai rataan 3,64 masuk dalam kategori Baik.

# B. Dimensi Waktu Penyelesaiaan

Tanggapan responden terhadap dimensi waktu penyelsaiaan dapat dikelompokan dengan berdasarkan pada indikator kepastian waktu, ketetapan waktu penyelesaian, kesesuaian jadwal pelayanan.

Tabel 2

Rekapitulasi indikator dimensi waktu penyelesaian

Pernyataan	Nilai Rentang	Kategori
Instansi penyedia laya	nan 3,48	Baik
memberikan kepastian wa	aktu	
penyelesaian layanan BL	U-E	
KIR Smart Card		
Penyelesaian pelayanan BL	U-E 3,41	Baik
KIR Smart Card dilaksanakan se	cara	
tepat waktu		
Proses pemberian layanan BL	U-E 3,56	Baik
KIR Smart Card dilaksana	kan	
dengan jadwal yang ada		
Rata-Rata	3,48	Baik

Sumber: Penelitian Tri Ratnasari 2024

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator Instansi penyedia layanan memberikan kepastian waktu penyelesaian layanan BLU-E KIR *Smart Card* memperoleh nilai 3,48 dengan kategori Baik, indikator Penyelesaian pelayanan BLU-E KIR *Smart Card* dilaksanakan secara tepat waktu memperoleh nilai 3,41 dengan

kategori Baik, indikator Proses pemberian layanan BLU-E KIR *Smart Card* dilaksanakan dengan jadwal yang ada memperoleh nilai 3,56 dengan kategori Baik. Sehingga dimensi waktu penyelesaian memperoleh skor rataan 3,48 yang dengan kategori Baik.

# C. Dimensi Biaya Layanan

Tanggapan responden terhadap dimensi biaya layanan dikelompokan dengan berdasarkan indikator pengenaan biaya sesuai peraturan, rincian atau biaya tarif yang jelas, dan tidak adanya praktik pungli.

Tabel 3
Rekapitulasi indikator dimensi biaya layanan

Pernyataan	Nilai Rentang	Kategori
Pengenaan biaya pada pelayanan	3,73	Baik
(Jika ada) ditetapkan sesuai dengan		
aturan.		
Adanya rincian atau biaya tarif yang	3,80	Baik
jelas (Jika ada).		
Tidak adanya praktik pungli	4,47	Sangat Baik
(Pungutan Liar) yang dilakukan		
petugas.		
Rata-Rata	4,0	Baik

Sumber: Penelitian Tri Ratnasari 2024

Berdasarkan data tabel diatas maka indikator Pengenaan biaya pada pelayanan (Jika ada) ditetapkan sesuai dengan aturan mendapat nilai 3,73 dengan kategori Baik, indikator Adanya rincian atau biaya tarif yang jelas (Jika ada) memperoleh nilai 3,80 dengan kategori Baik, indikator Tidak adanya praktik pungli (Pungutan Liar) yang dilakukan petugas memperoleh nilai 4,47 dengan kategori Sangat Baik. Dengan demikian dimensi biaya layanan memperoleh skor rataan 4,0 dengan kategori Baik.

# D. Dimensi Produk Layanan

Tanggapan responden terhadap dimensi produk layanan dapat dikelompokan dengan berdasarkan pada indikator kesesuain hasil pelayanan, fitur produk yang memberikan manfaat lebih dari fungsi utama, serta produk hasil layanan berfungsi secara efektif dan mudah dibawa.

Tabel 4

Rekapitulasi indikator dimensi produk layanan

Pernyataan	Nilai Rentang	Kategori
Hasil pelayanan yang akan diterima	3,72	Baik
telah sesuai dengan ketentuan yang		
ditetapkan		
Fitur produk Smart Card mampu	3,81	Baik
memberikan manfaat lebih dari		
fungsi utama.		
Poduk Smart Card berfungsi secara	3,92	Baik
efektif dan mudah dibawa		
Rata-Rata	3,81	Baik

Sumber: Penelitian Tri Ratnasari 2024

Berdasarkan data tabel diatas maka indikator Hasil pelayanan yang akan diterima telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan memperoleh nilai 3,72 dengan kategori Baik, indikator fitur produk *Smart Card* mampu memberikan manfaat lebih dari fungsi utama mendapat nilai 3,81 dengan kategori Baik, indikator produk *Smart Card* berfungsi secara efektif dan mudah dibawa memperoleh nilai 3,92 dengan kategori Baik. Dengan demikian dimensi produk layanan memperoleh skor rataan 3,81 dengan kategori Baik.

#### E. Dimensi Sarana dan Prasarana

Tanggapan responden pada dimensi sarana dan prasarana dapat dikelompokan berdasarkan indikator kenyamanan fasilitas,kebersihan lingkungan kerja, kelengkapan fasilitas.

Tabel 5
Rekapitulasi indikator dimensi sarana dan prasarana

Pernyataan	Nilai Rentang	Kategori
Adanya fasilitas pelayanan seperti	3,01	Cukup
ruang tunggu, tempat duduk dan		
toilet yang nyaman serta tempat		
parkir kendaraan yang memadai		
Lingkungan kerja di instansi	3,52	Baik
pelayanan UPT Pengujian		
Kendaraan Bermotor Dishub Depok		
yang bersih		
Adanya kelengkapan fasilitas	3,77	Baik
penunjang pelayanan seperti		
komputer, media pengumuman,		
telepon, monitor tv dan lain-lain.		
Rata-Rata	3,43	Baik

Sumber: Penelitian Tri Ratnasari 2024

Berdasarkan data tabel diatas maka indikator Adanya fasilitas pelayanan seperti ruang tunggu, tempat duduk dan toilet yang nyaman serta tempat parkir kendaraan yang memadai memperoleh nilai 3,01 masuk dalam kategori Cukup, indikator Lingkungan kerja di instansi pelayanan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Depok yang bersih memperoleh nilai 3,52 masuk dalam kategori Baik, indikator Adanya kelengkapan fasilitas penunjang pelayanan seperti komputer, media pengumuman, telepon, monitor tv dan lain-lain mendapatkan nilai

3,77 dengan kategori Baik. Dengan demikian dimensi sarana dan prasaran memperoleh skor rataan 3,43 dan masuk dalam kategori Baik.

# F. Dimensi Kompetensi Petugas Pemberi Layanan

Tanggapan responden terhadap dimensi kompetensi petugas pemberi layanan dapat dikelompokan dengan berdasarkan indikator kompetensi, keterbukaan sikap, kedisiplinan.

Tabel 6

Rekapitulasi 3 indikator dimensi kompetensi petugas pemberi layanan

Pernyataan	Nilai Rentang	Kategori
Petugas pemberi layanan telah	3,88	Baik
memiliki kompetensi yang baik		
dilihat dari aspek pengetahuan,		
keahlian, dan ketrampilan.		
Petugas pemberi layanan memiliki	3,86	Baik
keterbukaan dalam memberi		
layanan		
Petugas penyedia layanan bersikap	3,85	Baik
disiplin, sopan, ramah dan		
berpenampilan rapi dalam melayani		
masyarakat.		
Rata-Rata	3,86	Baik

Sumber: Penelitian Tri Ratnasari 2024

Berdasarkan data dari tabel diatas maka indikator Petugas pemberi layanan telah memiliki kompetensi yang baik dilihat dari aspek pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan memperoleh nilai 3,88 masuk dalam kategori Baik, inidkator Petugas pemberi layanan memiliki keterbukaan dalam memberi layanan mendapat nilai 3,86 dengankategori Baik, inidkator Petugas penyedia layanan bersikap disiplin, sopan, ramah dan berpenampilan rapi dalam melayani masyarakat mendapat nilai 3,85

dengan kategori Baik. Dengan demikian dimensi kompetensi petugas pemberi layanan memperoleh skor rataan 3,86 dengan kategori Baik.

# G. Rekapitulasi

Tabel 7 Rekapitulasi dimensi kualitas pelayanan

Dimensi	Indikator	Skor	Kategori
Prosedur	Prosedur pelayanan BLU-E	3,74	Baik
Pelayanan	KIR Smart Card yang		
	dijalankan telah dilaksanakan		
	secara konsisten dan		
	berkelanjutan.		
	Prosedur pelayanan BLU-E	3,75	Baik
	KIR Smart Card yang diberikan		
	memudahkan pengguna jasa		
	layanan.		
	Prosedur pelayanan pada UPT	3,43	Baik
	Pengujian Kendaraan		
	Bermotor Dishub Depok		
	memuat alur yang terperinci		
	baik berupa rincian tulisan		
	maupun gambar.		
	Rata-Rata	3,64	Baik
Waktu	Instansi penyedia layanan	3,48	Baik
Penyelesaian	memberikan kepastian waktu		
	penyelesaian layanan BLU-E		
	KIR Smart Card		

Penyelesaian pelayanan BLU-E	3,41	Baik
KIR Smart Card dilaksanakan		
secara tepat waktu		
Proses pemberian layanan	3,56	Baik
BLU-E KIR Smart		
Card dilaksanakan dengan		
jadwal yang ada		
Rata-Rata	3,48	Baik
Pengenaan biaya pada	3,73	Baik
pelayanan (Jika ada) sesuai		
dengan aturan		
Adanya rincian atau biaya tarif	3,80	Baik
yang jelas (Jika ada).		
Tidak adanya praktik pungli	4,47	Sangat Baik
(Pungutan Liar) yang		
dilakukan petugas.		
Rata-Rata	4,0	Baik
Hasil pelayanan yang akan	3,72	Baik
diterima sesuai dengan		
ketentuan yang telah		
ditetapkan.		
Fitur produk Smart	3,81	Baik
Card mampu memberikan		
manfaat lebih dari fungsi		
utama.		
Poduk Smart Card berfungsi	3,92	Baik
secara efektif dan mudah		
dibawa		
	KIR Smart Card dilaksanakan secara tepat waktu Proses pemberian layanan BLU-E KIR Smart Card dilaksanakan dengan jadwal yang ada Rata-Rata Pengenaan biaya pada pelayanan (Jika ada) sesuai dengan aturan Adanya rincian atau biaya tarif yang jelas (Jika ada). Tidak adanya praktik pungli (Pungutan Liar) yang dilakukan petugas. Rata-Rata Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fitur produk Smart Card mampu memberikan manfaat lebih dari fungsi utama. Poduk Smart Card berfungsi secara efektif dan mudah	KIR Smart Card dilaksanakan secara tepat waktu  Proses pemberian layanan BLU-E KIR Smart Card dilaksanakan dengan jadwal yang ada  Rata-Rata 3,48  Pengenaan biaya pada pelayanan (Jika ada) sesuai dengan aturan  Adanya rincian atau biaya tarif yang jelas (Jika ada).  Tidak adanya praktik pungli (Pungutan Liar) yang dilakukan petugas.  Rata-Rata 4,0  Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  Fitur produk Smart Card mampu memberikan manfaat lebih dari fungsi utama.  Poduk Smart Card berfungsi 3,92 secara efektif dan mudah

	Rata-Rata	3,81	Baik
Sarana dan	Adanya fasilitas pelayanan	3,01	Cukup
Prasarana	seperti ruang tunggu, tempat		
	duduk dan toilet yang nyaman		
	serta tempat parkir kendaraan		
	yang memadai		
	Lingkungan kerja di instansi	3,52	Baik
	pelayanan UPT Pengujian		
	Kendaraan Bermotor Dishub		
	Depok yang bersih		
	Adanya kelengkapan fasilitas	3,77	Baik
	penunjang pelayanan seperti		
	komputer,media		
	pengumuman, telepon,		
	monitor tv dan lain-lain.		
	Rata-Rata	3,43	Baik
Kompetensi	Petugas pemberi layanan telah	3,88	Baik
Petugas	memiliki kompetensi yang		
	baik dilihat dari aspek		
	pengetahuan, keahlian, dan		
	ketrampilan.		
	Petugas pemberi layanan	3,86	Baik
	memiliki keterbukaan dalam		
	memberi layanan		
	Petugas penyedia layanan	3,85	Baik
	bersikap disiplin, sopan,		
	ramah dan berpenampilan rapi		
	dalam melayani masyarakat.		

Rata-Rata	3,86	Baik
Total Rata-Rata	3,70	Baik

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di jelaskan di atas yang membahas tentang Analisis Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Angkutan Barang Dengan Berbasis Sistem BLU-E (Bukti Lulus Uji Elektronik) Pada Kantor Dishub Kota Depok, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1. Bukti Lulus Uji Elektronik adalah salah satu bentuk pemanfaatan kemajuan teknologi yang dikembangkan oleh Kementrian Perhubungan dan telah diluncurkan pada tahun 2019. BLU-E mengganti buku KIR menjadi *smart card* dan sertifikat uji. Kebijakan penggantian ini merupakan program nasional yang telah mulai diterapkan pada Tahun 2020 sesuai dengan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 133/2015, tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Pemerintah Kota Depok telah menetapkan kebijakan BLU-E KIR tersebut pada DISHUB tepatnya pada UPTD pengujian kendaraan bermotor pada 23 Februari 2023.
- 2. Analisis kualitas pelayanan pengujian angkutan kendaraan bermotor yang berbasisis BLU-E pada Kantor Dishub Kota Depok sudah masuk dalam kategori baik dengan skor 3,70. Nilai tertinggi diperoleh pada dimensi biaya layanan yang memperoleh skor rataan 4,47 dengan kategori sangat baik. Sedangkan penilian terendah diperoleh pada dimensi sarana dan prasaran dengan skor rataan 3,01 dengan kategori cukup.

#### **REFERENSI**

- Utami, A. A., Hernawan, D., & Purnamasari, I. (2020). Analisis Kualitas

  Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan

  Barang. *Jurnal Governansi*, 6(2).
- Salbiah, E., & Apriliani, A. (2022). Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Pada Kantor Kecamatan. *Jurnal Pemerintahan*, 8 (2), 141-152.
- Rinaldi, R. (2012). Analisis kualitas pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik* (*Jurnal Administrasi Publik*), 2 (1), 22-34.
- Oktarianda, I., & Rusli, Z. (2023). Pengawasan Penerapan Smart Card Blue oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 4588-4597.
- Noviana, N., & Noor, M. (2021). Implementasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Pemenuhan Persyaratan Teknis di Dinas Perhubungan Kota Semarang. *Public Service and Governance Journal*, 2(02), 75-84.
- Putra, I. M. E. L., & Yoga, G. A. D. M. (2022). Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Penerapan Blue Sistem pada Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *Widya Manajemen*, 4(1), 34-46.
- ADITRI, Y. (2020). ANALISA SWOT DALAM RANGKA PENERAPAN BUKTI LULUS

  UJI ELEKTRONIK (BLU-e) DI UPTD PKB PINANG BARIS KOTA

  MEDAN (Doctoral dissertation, POLITEKNIK KESELAMATAN

  TRANSPORTASI JALAN).
- Yusron, S. A., & Zubaidah, E. (2024). Penerapan KIR Online di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 407-423.
- Erlangga, G., & Anis, I. M. (2024). Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Uji Kendaraan Bermotor (KIR)(Studi Kasus: Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).